

**Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam
Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah
Umur (Studi Putusan No.51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)**

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Bagus
NIM. C73214056



**Universitas Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Studi Hukum Pidana (Jinayah)
Surabaya**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Bagus
NIM : C73214056
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Tindak
Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur
(Studi Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 April 2018

Saya yang menyatakan


Mon. Bagus
C73214056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Bagus NIM. C73214056 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 03 April 2018

Pembimbing,



H. Mahir Amin M. Fil. I
NIP.197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Bagus ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 26 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



H. Mahir Amin M. Fil. I
NIP.197212042007011027

Penguji II,



Drs. Achmad Yasin, M. Ag.
NIP.196707271996031002

Penguji III,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH.,
MHL, Dip. Lead
NIP.197606132003121002

Penguji IV,



Holilur Rohman, MHL
NIP.198710022015031005

Surabaya, 26 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP.19683091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Bagus
NIM : C73214056
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : moch_bagus0@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

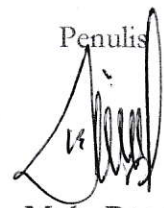
Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Mei 2018

Penulis

Moh. Bagus
C73214056

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No. 51 Pid.Sus/2016/PN.Kbu)” ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pertimbangan hukum hakim, (2) menganalisis dari perspektif hukum acara pidana yang diterapkan oleh majelis hakim, dan (3) menganalisis dari perspektif hukum acara pidana Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan mengeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan No. 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu adalah dikarenakan salah satu unsur dalam pasal 81 ayat (2) UU No, 35 Tahun 2014 tidak terpenuhi. Unsur tersebut adalah unsur objektif yakni kalimat “tipu muslihat”. Hakim berpendapat bahwa, tidak ada bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain. Sehingga hakim memutus bebas terdakwa. Dari analisis penerapan hukum acara pidana, majelis hakim lebih condong menggunakan teori pembuktian *convention in time* sehingga keyakinan hakim sangat kuat pengaruhnya terhadap putusan. Dalam hukum acara pidana islam alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yakni pengakuan (*ikrar*), kesaksian (*syahadah*), petunjuk (*qorinah*), dan sumpah (*yamin*). Selain itu juga diajukan alat bukti berupa *syahādah al iftifadlah* atau dalam hukum positif disebut dengan saksi *testimonium de auditu*.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah para hakim untuk senantiasa berpaku kepada teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP, agar dalam penerapannya memberikan kepastian hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM.....	24
A. Pembuktian Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	24
1. Pengertian Pembuktian	24

PENDAHULUAN

Reformasi ketatanegaraan melalui proses amandemen UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah supremasi hukum yang harus ditegakkan tanpa ada pandang bulu. Melalui semangat konstitusionalisme UUD NRI 1945 telah menjelma sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang harus dijadikan utama dalam pelaksanaan kehidupan bernegara.¹ Termasuk dalam penegakan tindak pidana dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sejak saat itu pembangunan bidang hukum terus menjadi tombak utama guna menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi negara. Hukum dapat dikatakan sempurna jikalau teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).²

Perkembangan kriminalitas yang ada di masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari pengaturan terhadap tindak pidana

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

Banyaknya upaya penegakan keadilan yang ada di masyarakat telah mendorong lembaga-lembaga penegak hukum untuk menegakkan keadilan yang substantif. Semboyan *fiat justitia, ruat caelum* atau tegakkan hukum (keadilan) meskipun langit akan runtuh pun telah menggema di kalangan masyarakat.³ Berkaitan dengan hal tersebut, persoalan keadilan akan dirasakan oleh berbagai pihak yang merasa telah dirugikan oleh tindak pidana. Dengan penjatuhan pidana maka diharapkan semua konflik harus diselesaikan, keseimbangan harus kembali dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat. Pada hakikatnya tujuan hukum pidana adalah *protection of the public and the promotion of justice for victim, offender and community*.

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di negara Indonesia menjadikan seluruh elemen masyarakat mampu mengakses dunia luar dengan bebas, sehingga memengaruhi pola pergaulan dan kehidupan dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah tindak pidana terhadap anak (pencabulan) yang dari hari ke hari semakin banyak.

Tindak pidana terhadap anak atau pelecehan seksual telah mendapatkan

[illegible]

Sedangkan menurut *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, “*sexual assault*” adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban.⁵

Pencabulan atau perbuatan cabul di Indonesia telah diatur dalam KUHP pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, dan 296 yang

⁵ Vani Rahmawati, "Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)", (Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), 36.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 merupakan respon pemerintah untuk menanggulangi kejahatan pelecehan terhadap anak atau cabul yang semakin marak di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan yang bersifat khusus dari pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang pencabulan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut pasal 81 ayat (1) menyatakan “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan ketentuan pasal 81 ayat (2) menyatakan “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

[illegible]

Sedangkan dalam hukum Islam pencabulan atau pelecehan seksual masuk dalam kategori zina. Secara harfiah zina mempunyai arti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina menurut istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁷ Sedangkan zina menurut *fuqaha* dari kalangan madzab Hanafi adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *shubhat*.⁸

Dasar hukum perbuatan zina telah diatur dalam Al-Quran surat al Isra ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya; Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia yang melarang perbuatan pencabulan atau zina. Hukum Islam pun telah melarang adanya perbuatan pencabulan atau zina, bahkan hukuman dalam hukum Islam lebih berat dari hukum positif. Salah satu bentuk hukuman bagi pezina

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37

⁸ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 119.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al qur'an dan terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 285.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (*menjalankan*) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (*pelaksanaan*) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Sedangkan di Aceh yang menggunakan *syariat* Islam dalam hukuman pidana (*jinayat*) berbeda dengan hukum positif dan hukum Islam. Namun secara garis besar hukuman bagi pezina atau perbuatan cabul di Aceh lebih mengambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam.

Di Aceh pencabulan atau zina disebut dengan pelecehan seksual yang telah diatur dalam pasal 1 angka 21 Qonun Hukum Jinayat Aceh (QHJA) , dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaannya.¹⁰

Dalam hal ini telah diatur dalam pasal 27 dan 28.

Telah banyak penjelasan baik dalam hukum positif, hukum Islam, maupun Qonun Hukum Jinayat Aceh perbuatan cabul atau pelecehan seksual tetap berkembang semi di Indonesia. Upaya pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

¹⁰ Neng Djubaedah..., 111.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, yakni terkait perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang telah diputus bebas oleh hakim anak Pengadilan Negeri Kota Bumi, penulis tertarik untuk mengangkat dalam Skripsi ini guna mengetahui pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut. Apakah hakim sudah sesuai penerapan unsur-unsur dalam pasal-pasal sebagaimana di dakwakan oleh jaksa serta ditinjau dari perspektif hukum acara pidana Islam atau *fiqih muraḩa'at*.

Hal tersebut yang kemudian membuat penulis tertarik serta menjadi alasan bagi penulis untuk mengangkat dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian, antara lain:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan pencabulan terhadap anak.
2. Pandangan hukum positif terhadap kejahatan pencabulan terhadap anak.

- Dari identifikasi beberapa masalah tersebut, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, yakni:

- [illegible]

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- #### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak

Skripsi tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak telah banyak yang menulis, antara lain:

- ¹² Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p, 2014), 8

Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Tawakal mahasiswa program studi Siyasa Jinayah (SJ) pada tahun 2009. Skripsi tersebut berjudul “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/Pid.B/2008/PNSby Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini pada pokoknya membahas terkait putusan hakim yang memutus ringan, yakni 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 1.000 (seribu rupiah). Padahal dalam UU No. 23 Tahun 2002 hukuman minimal 3 tahun bagi pelakunya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam maka anak di bawah umur dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* atau hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat).¹⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Musahab mahasiswa progran studi Siyasaah Jinayah (SJ) pada tahun 2013. Skripsi tersebut berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU. No 23 Tahun 2002”. Pada pokoknya skripsi tersebut membahas terkait dengan pandangan fiqh jinayah terhadap sanksi perbuatan cabul

¹⁴ Iqbal Tawakal, “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/Pid.B/2008/PNSby Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel 2009)

unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal alternatif yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terpenuhi. Sedangkan dalam pandangan hukum pidana Islam pencabulan merupakan tindak pidana zina yang mana hukuman bagi pelakunya (zina muhsan) adalah dirajam sampai mati. Islam juga sangat menganjurkan perlindungan terhadap hak-hak anak.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi, adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu ?
2. Untuk mengetahui penerapan hukum acara pidana terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum acara pidana Islam terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dalam penulisan skripsi ini, adalah:

- ### G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas terkait dengan permasalahan y

Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 132.

1. Hukum acara pidana Islam atau fikih murafa'at adalah hukum-hukum yang mengatur cara mengajukan perkara, perselisihan, penuntutan, dan cara-cara penetapan suatu tuntutan yang dapat diterima, dan cara-cara yang dapat melindungi hak-hak seseorang.
2. Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (pasal 191 ayat (1) KUHAP).¹⁸ Dalam hal ini adalah pendapat hakim dalam Putusan No. 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan pencabulan terhadap anak.
3. Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahi. Misalnya, berciuman, meraba-raba kemaluan, dan meraba-raba buah dada.¹⁹ Dalam hal ini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak korban yang masih berusia 17 tahun.

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang...*, 212.

- 7) Rahmawati, Vani. *“Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)”*. Skripsi-- Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

3. Teknik pengumpulan data

Karena kategori penelitian ini studi pustaka atau literatur, maka teknik pengumpulan data perlu diselaraskan dengan sifat penelitiannya.

Terkait hal tersebut, teknik yang digunakan adalah *record* dan dokumentasi. *Record* adalah setiap pernyataan yang tertulis dan disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.²³ Teknik *record* penulis gunakan penulis gunakan dalam menghimpun data melalui dokumen putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu.

Sedangkan yang dimaksud dengan dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa: buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian.²⁴

²³ Lexy J. Melcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 216.

²⁴ Ibid., 217.

1. BAB I PENDAHULUAN

2. BAB II KERANGKA TEORITIS

3. BAB III DATA PENELITIAN

[illegible]

cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴

Pembuktian juga mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan. Pembuktian juga memiliki arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya, sehingga harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya.⁵

Dari berbagai pendapat pakar hukum di atas pembuktian ditinjau dari hukum acara pidana, antara lain:⁶

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan-ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan

⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 273.

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 133.

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan...*, 274.

Sistem ini menempatkan hakim sebagai orang yang tidak bisa berbuat salah (*judge can do no wrong*). Sistem ini juga menyebabkan kesulitan dalam pengawasan hakim. Sistem ini telah banyak dipakai di Prancis yang mana telah banyak menghasilkan putusan bebas yang tidak mencerminkan rasa keadilan.⁹

Dalam sistem ini dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim masih memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Jika dalam sistem pembuktian *convention in time* peran keyakinan hakim luas dan tanpa batas maka dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* keyakinan hakim harus disertai alasan-alasan yang jelas.¹⁰

⁸ Hendrastanto Yudowidakdo, dkk, *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 238.

Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini juga disebut dengan sistem pembuktian bebas.

3. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif
(*Positief Wettelijk Bewijstheori*)

Sistem pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem pembuktian *conviction in time*. Sistem pembuktian *Positief Wettelijk Bewijstheori* berpegang pada terpenuhinya alat-alat bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.¹¹ Meskipun hakim yakin bahwa terdakwa telah bersalah, maka terdakwa tidak dapat diputus bersalah atau harus dibebaskan. Segi positif dari sistem pembuktian ini adalah hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa secara objektif dan tidak bergantung pada subjektivitas hakim.

Dalam sistem pembuktian positif, yang dicari adalah kebenaran formal dan umumnya digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelinjk bewijstheory system* di Benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya hukum acara pidana bersifat *inquisitoir*.

¹¹ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana...*,79.

Sistem pembuktian menurut undang-undang negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.¹²

Sistem pembuktian *negatief wettelijk stelsel* didasarkan pada keyakinan hakim dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Syarat untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak, yaitu: pertama, *wettelijk* atau alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kedua, *negatief* atau berdasarkan keyakinan hakim. Namun antara alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim harus memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat.

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan...*, 278.

Sistem pembalikan beban pembuktian atau biasanya disebut dengan sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa. Sistem ini berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana secara universal. Dalam hukum pidana formil baik sistem eropa kontinental ataupun Anglo-Saxon lebih sering dikenal bahwa pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu (*certain case*) diperkenankan penerapan dengan mekanisme *diferensiasiel*, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal sebagai “*Reversal of Burden Proof*”. Itupun tidak dilakukan secara *over all*, tetapi masih memiliki batas-batas yang seminimal mungkin agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak tersangka atau terdakwa.¹³

¹³ Ikhwan Fahroji, *Hukum Acara Pidana...*, 80.

Selain diatur dalam UU Perlindungan Konsumen juga telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Yakni dalam pasal 12 B ayat (1) huruf (a) berkaitan dengan gratifikasi yang mengandung delik sistem pembuktian terbalik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah merumuskan dalam pasal-pasal nya terkait dengan sistem pembuktian yang digunakan dalam peradilan di Indonesia. Hal ini dapat kita baca dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah dan benar-benar melakukannya”.¹⁴

¹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan...*, 280.

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

[illegible]

Oleh karena itu alat bukti surat resmi atau autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en beslissende bewijskracht*), hakim tidak akan bebas lagi untuk menilainya dan terikat kepada pembuktian surat tersebut dalam mengambil putusan perkara perdata yang bersangkutan.¹⁸

Alat bukti petunjuk berdasarkan pengertian pasal 188 ayat (1) adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹⁹

¹⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan...*, 309.

[illegible]

Pembuktian berasal dari kata “*al-Bayyinah*” yang memiliki arti sesuatu yang menjelaskan.²³ Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Abd al ‘Aziz dalam bukunya menyatakan yang dimaksud dengan pembuktian adalah membuktikan suatu perkara dengan memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.²⁴

Sedangkan ulama dari kalangan Hanafi menyebutkan bahwa alat-alat bukti dalam bentuk *nadzam* yang terdiri dari tiga buah, yaitu sebagai berikut:²⁵

سَاهِدِي لِمَنْ رَامَ الْقِصَا طْرُ قَالَهُ * بِمَا يَهْتَدِي إِنْ مُطْلِمُ الْحُطْبِ أَغْضَرَا
يَمِينَ وَ إِفْرَارُ نُكُولٍ فَسَا مَةٌ * وَبَيِّنَةٌ عِلْمٍ بِهِ يَا أَحَا الْعُلَا
كَذَا كَ الَّذِي يَبْدُو لَهُ مِنْ قَرَائِنَ * إِذَا بَلَغَتْ حَدُّ الْيَقِينِ فَحَصَلَا

Aku akan memberi petunjuk berupa alat-alat bukti bagi orang-orang yang bermaksud mengadakan perkara, apabila orang berada

²³ Sulaikhhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135.

²⁵ H. A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 94

Demikian juga sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk, apabila semua itu telah meyakinkan maka berhasillah (pembuktian itu).

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkar atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para

Artinya: “Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan dzohir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya”.²⁷

Kaidah ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَدِّ عَنِ الْيَمِينِ عَلَى الْمَدِّ عَنِ عَلَيْهِ

Artinya: “Bukti itu atas di penggugat dan sumpah atas si tergugat”

Hadis ini sebagai dasar hukum pembebanan dan pembuktian, artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu benar adanya, dan sebaliknya untuk pihak yang tergugat sebelum menyampaikan jawaban atas gugatannya akan dikenakan beban sumpah.²⁸

2. Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam

Dalam kitab *ath Thuruq al-Hukmiyah*, Ibnu al-Qayyim menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) alat bukti yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan, beliau menyimpulkan dari al-Qur'an dan Hadits yang sahih atau dari praktik-praktik Nabi Muhammad saw.

Menurut Ibnu al-Qayyim, alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:²⁹

²⁷ Ibid., 42.

²⁸ Ibid., 43.

²⁹ H. A Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, 34-37.

- tidak memiliki bukti.
3. Bukti penguasaan atas sesuatu dan sumpah atas
ada seseorang yang dituduh bahwa yang dimilikin
miliknya, kemudian pemilik hak itu menyangk
tersebut lalu ia diminta bersumpah maka pemilik
miliknya, dan jika tidak mau maka cabutlah
kekuasanya.

2. Syahadah (kesaksian)

Sedangkan menurut syara' kesaksian menurut pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan melihat langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.³⁷

Kewajiban untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian didasarkan pada firman Allah SWT QS. al-Baqarah (2) 282 yang berbunyi:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum...*, 137.

³⁶ Ibid., 139.

³⁷ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut...*, 73.

- a. Dewasa
- b. Berakal
- c. Mengetahui apa yang disaksikan
- d. Beragama Islam
- e. Adil
- f. Saksi harus dapat melihat
- g. Saksi harus dapat berbicara

Qarinah secara bahasa diambil dari kata “*muqaromah*” yang memiliki arti petunjuk. Secara istilah qarinah diartikan dengan:

“Tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad”

- a. *Qarinah Qonuniyyah* yaitu qarinah yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. *Qarinah Qodloiyyah* yaitu qarinah yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara.

[illegible]

- a. Qarinah harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah oleh manusia yang berakal
- b. Qarinah menurut Undang-undang dilingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum islam.

Sumpah menurut ahli fiqh adalah pernyataan yang khidmat yang diucabkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan diberikan hukuman oleh-Nya. Menurut hukum islam istilah sumpah lebih dikenal dengan *Al-Yamin*, namun dalam konteks hukum pidana biasa lebih dengan istilah *Qasamah*.⁴⁰

³⁹ Ibid., 89.

[illegible]

Dalam madzab asy Syafi'i dan Imam Malik, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika penggugat menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat dan jika penggugat bersumpah maka dimenangkan. Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutus perkara.

Disisi lain Madzab Adzahiri dan Ibnu Hazem, menetapkan hukum berdasar penolakan sumpah dan pengembalian sumpah, yakni tidak memiliki dasar hukum yang kuat.⁴⁴

⁴⁴ Ibid., 103.

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTABUMI NOMOR
51/PID.SUS/2016/PN/KBU TENTANG PUTUSAN BEBAS PENCABULAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

Kasus pencabulan anak dibawah umur yang di putus bebas oleh Pengadilan Negeri Kotabumi dengan terdakwa bernama Febri Anggara alias Angga Bin Heri Nugroho. Terdakwa lahir pada 2 Februari 1991 di Trimodadi. Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Kemalo Abung Rt. 003, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara ini saat ini berusia 25 tahun. Beliau telah memiliki istri dan beragama islam serta bekerja sebagai supir.

Terdakwa Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho pada hari minggu tanggal 11 oktober 2015 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (yang berhak memeriksa / mengadili perkara tersebut), *sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain).*

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal ketika anak saksi korban bernyanyi di acara pernikahan. Setelah berkenalan pertama kali Terdakwa dan Anak saksi korban berjanji di pasar lama Desa Trimodadi dan akhirnya mereka bertemu, kemudian terdakwa dan Anak saksi korban pergi menuju pasar Kotabumi untuk menemani Anak saksi korban mencari sepatu.

Sepulang dari pasar terdakwa mengajak Anak saksi korban kerumah saksi Aan, sesampainya dirumah saksi Aan hanya ada Aan sendiri, dan pada saat Aan ke kamar mandi saat itu terdakwa mencoba merayu Anak saksi korban dengan berkata “yang mau gak kayak yang di video itu” kemudian Anak saksi korban menjawab “takut” kemudian terdakwa berkata “nanti saya tanggung jawab, besok kita nikah” lalu Anak saksi korban menjawab “janji dulu” dijawab Terdakwa “iya saya janji saya bakal nikahin kamu.

Setelah itu Anak saksi korban dibawanya kekamarnya si Aan, ketika di dalam kamar terdakwa menyuruh Anak saksi korban untuk membuka celana *jeans* yang Anak saksi korban pakai. Kemudian Anak saksi korban menuruti permintaan terdakwa dengan membuka celana *jeans* dan celana dalam yang dipakai hanya sampau selutut.

Setelah dibuka terdakwa langsung mencium bibir Anak saksi korban sambil tangan terdakwa memegang kedua payudara dengan kedua tangannya kira-kira kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa melakukan itu, dan pada saat itu Anak saksi korban merasa terangsang. kemudian

terdakwa langsung menidurkan Anak saksi korban dikasur tempat tidur. Kemudian terdakwa membuka celananya hanya setengah saja, lalu membuka kaki Anak saksi korban sehingga mengakang dan terdakwa sambil memegang kemaluan (vagina) Anak saksi korban dengan cara dipegang-pegang bibir alat kemaluan (vagina).

Setelah itu terdakwa langsung mencoba memasukkan alat kemaluanya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak saksi korban, tetapi alat kemaluan (penis) terdakwa tidak dapat masuk ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak saksi korban. Anak saksi korban dan terdakwa terus mencoba memaksa dengan cara Anak saksi korban melihat terdakwa memegang alat kemaluanya (penis) dan mengarahkan ke kemaluan (vagina) Anak saksi korban dengan cara mendorong berkali-kali sehingga alat kemaluanya (penis) masuk kedalam alat kemaluan (vagina) Anak saksi korban.

Anak saksi korban merasakan sakit, perih, pusing, dan tubuh Anak saksi korban merasa lemas. Terdakwa memasukkan alat kemaluanya (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak saksi korban kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, yang dirasakan Anak saksi korban setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tubuh anak saksi anak saksi korban lemas sekali.

kemudian Anak saksi korban memakai kembali celana *jeans* dan celana dalamnya yang dibantu oleh terdakwa, lalu terdakwa mengajak Anak saksi korban keluar kamar dan Anak saksi korban dan terdakwa

serta saksi Aan mengobrol di ruang tamu sambil makan mangga kurang lebih mengobrol selama 1 (satu) jam, setelah itu Anak saksi korban dan terdakwa pulang kerumah.

Anak saksi korban dan terdakwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Aan, pernah juga melakukan di dalam mobil kijang dengan nomor polisi BE 2029 J dalam perjalanan dari pantai pulau pasir kearah pulang Sri Mulyo, dan juga di dalam mobil 1300 *pick up* warna hitam dengan nomor polisi BE 9115 FD yaitu di pom bensin kearah Bandar jaya dan disebelum taruko II masuk ke dalam gang.

Pada tanggal 21 Fenruari 2016 saksi Siti Fatimah bermain kerumah orang tua saksi Marlina Wati di Srimulyo Rt 003 Rw 001 kel. Srimulyo Kec. Anak Ratu Aji Kab. Lampung Tengah, sambil melihat baju dan sambil ngerumpi saksi Marlina Wati berkata kepada saksi Siti Fatimah bahwa “adik kamu pernah saya lihat dijemput seorang laki-laki” dan ayuk (korban) yaitu saksi Siti Fatimah menjawab “siapa” saksi Marlina Wati menjawab “saya tidak kenal”.

Kemudian saksi Siti Fatimah bercerita masalah keluarganya kepada saksi Marlina Wati bahwa adiknya saksi Anak saksi korban telah dicabuli atau disetubuhi oleh terdakwa dan hubungan terdakwa dan Anak saksi korban sudah 4 (empat) bulan pacaran, ternyata terdakwa sudah mempunyai istri, padahal terdakwa sempat berjanji dengan Anak saksi korban siap bertanggung jawab dan janji akan menikahnya namun

Dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat dalam hal mana setelah majelis hakim menghubungkan juga menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- [illegible]

5. Bahwa anak saksi Korban lahir pada tanggal 10 Oktober 2003 atau berusia lebih kurang 17 tahun.
6. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan atau kekerasan terhadap anak saksi Korban.
7. Bahwa istri Terdakwa dan saksi Korban telah menandatangani Surat Perdamaian tertanggal 3 Januari 2016 yang pada keduabelah pihak sudah menjadi keluarga dan saksi Korban berjanji tidak akan berhubungan dengan Terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu bahwa Penuntut Umum (JPU) telah memberikan tuntutan kepada terdakwa Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap Anak dibawah umur” sebagai dakwaan ke 2 yakni melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Maka dari itu pertimbangan-pertimbangan hakim yang dipaparkan dalam skripsi ini adalah terkait dengan penjelasan unsur

dari pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim:

Unsur “setiap orang”, menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya.

Maka dari untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta menghindari kekeliruan terhadap orang.

Selanjutnya dalam membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho yang dihadapkan sebagai terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau

Selanjutnya dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan akal cerdas sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dengan cara memberikan perkataan bohong atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan tersusun rapi sehingga kebohongan yang satu menutup kebohongan lainya untuk memengaruhi orang untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui maksud dari pelakunya ia tidak akan berbuat demikian.

Secara umum unsur ini bersifat alternative sehingga apabila terpenuhi selain satu sub unsur yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi.

Selanjutnya dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo
(*Vide Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta*

Menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pengertian ini tidak lagi memungkinkan untuk memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat karena apabila pengertian ini diterapkan terhadap perbuatan seseorang laki-laki yang telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan dan tidak sampai keluar air maninya maka dapat dianggap telah tidak terjadi persetubuhan.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun.

Kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan bahwa pada hari minggu di bulan oktober 2015 sekira pada pukul 14:00 WIB bertempat di rumah saudara Aan yang beralamat di Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Terdakwa telah menyetubuhiih anak saksi korban.

Terdakwa dan anak saksi korban pertamakali berkenalan di Desa Jerangkang Kecamatan Abung Selatan yang pada saat itu anak saksi korban sedang bernyanyi di acara pernikahan di Desa tersebut, setelah seminggu berkenalan pada hari minggu di bulan Oktober 2015 sekira jam 08:00 WIB terdakwa janji dengan anak saksi korban dengan cara

Setelah mengobrol sebentar dengan saudara Aan, saksi korban meminjam kamar saudara Aan dengan alasan untuk berdandan dan minta ditemani Terdakwa karena takut sendirian, kemudian anak saksi Korban dan Terdakwa masuk ke kamar Aan sedangkan saudara Aan pergi dari ruang tamu untuk menerima telpon kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa mneyetubuhi saksi Korban dengan cara Terdakwa mencium bibir anak saksi korban, memegang payudara kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kelamin (vegina) anak saksi Korban.

[illegible]

Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tuntutan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu saksi Korban, saksi Siti Fatimah Binti Daliman dan saksi Marlana Wati Binti Margono. Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi yang meringankan yaitu saksi Ahmad Rivai, saksi Edi Suprianto, saksi Evi Cristiani, saksi Cik John, saksi Jainudin, dan saksi Arrohma Tia Sari.

[illegible]

Disisi lain Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan saudara Aan sebagai saksi tanpa alasan yang jelas, walaupun saksi tersebut tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sebagai saksi yang berdasarkan keterangan anak saksi Korban dan keterangan Terdakwa bahwa di rumah saudara Aan lah pertama kali mereka melakukan persetubuhan.

Selanjutnya hasil dari Surat Visum Et Repertum dari Rumah Saksi Hi. Muhammad Yusuf: 001/VER/RS-HMY/II/2016 tanggal 9 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Sri Haryati, M. Kes dan diketahui dr. I Wayan Surya Wibowo, MMR yang menyatakan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek lama pada bibir vagina akibat benda tumpul tidak secara jelas (*eksplisit*) yang dapat ditarik kesimpulan dari padanya bahwa anak saksi Korban telah disetubuhi. Akan tetapi berdasarkan keterangan anak saksi Korban dihubungkan dengan adanya keterangan Terdakwa bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari 1 (satu) kali sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi Korban adalah benar adanya.

Keterangan anak saksi Korban dan keterangan Terdakwa mengenai awal mulanya sehingga anak saksi Korban bersetubuh dengan Terdakwa, karena keterangan dari anak saksi Korban menerangkan bahwa Terdakwa membujuk atau merayunya dengan janji Terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi anak saksi Korban, sedangkan

berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ketika pertama kali diajak untuk bersetubuh anak saksi Korban langsung mau dan persetubuhan anak saksi Korban dengan Terdakwa itu bukanlah persetubuhan yang pertama kali bagi anak saksi Korban dengan laki-laki lain.

Selanjutnya untuk membuktikan apakah ada perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak saksi Korban Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi-saksi lainnya untuk mendapatkan petunjuk apakah keterangan anak saksi Korban ataukah keterangan Terdakwa yang benar.

Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Rivai dan Saksi Edi Suprianto yang menerangkan bahwa dalam perjalanan malam tahun baru 2016 yang sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi anak saksi Korban, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim anak saksi Korban berbohong dan keterangannya tidak benar bahwa telah terjadi persetubuhan antara dirinya dengan Terdakwa pada waktu tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi Edi Suprianto dihubungkan dengan keterangan saksi Evi Cristiani dan saksi Ahmad Rivai bahwa saksi Korban berprofesi sebagai penyanyi orgen yang perilaku kehidupannya sehari-hari kurang baik dan pernah mengganggu suami orang dan sering dibawa laki-laki.

Bahwa berdasar kan keterangan saksi Fatimah Binti Daliman dihubungkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi Evi Cristiani, saksi

Cik John, saksi Jainudin dan saksi Arrohma Tia Sari bahwa istri Terdakwa telah melakukan perjanjian damai dengan saksi Korban dihadapan keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Korban yang pada intinya anak saksi Korban berjanji tidak akan mengganggu Terdakwa lagi yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai tertanggal 3 Januari 2016.

Keterangan saksi Arrohma Tia Sari dihubungkan dengan bukti fotocopian sms-sms antara anak saksi Korban bahwa anak saksi Korbanlah yang aktif merayu dan menggoda Terdakwa.

Selama pemeriksaan anak saksi Korban di persidangan Majelis Hakim mengamati gerak-gerik (*gesture*) tubuh dan mimic wajah anak saksi Korban ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim kepadanya berkaitan dengan peristiwa yang menimpa dirinya tidaklah mencerminkan perilaku anak yang takut karena telah melakukan perbuatan yang salah menurut agama yaitu berhubungan intim dengan suami orang walaupun anak saksi Korban secara agama islam sudahlah *akil baligh* malahan dengan gamblangnya anak saksi Korban mengaku bahwa ia melaporkan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau menikahi dirinya.

Pendapat Majelis Hakim walaupun anak saksi Korban seorang anak yang masih berumur 17 tahun akan tetapi perilaku kehidupan kesehariannya sudahlah bukan anak-anak yang masih polos dan anak saksi korban sudah mengerti perbuatan benar dan salah.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak haruslah (diutamakan) dilindungi akan tetapi perlindungan tersebut tidaklah serta merta mengabaikan dan mengurangi hak-hak asasi warga negara lainya dan mengingat pula unsur tindak pidana dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini sendiri bahwa perlunya dibuktikan perbuatan kesengajaan dari Terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumusan unsur ini bermakna yang perlu dibuktikan adalah perbuatan dan bukan hanya peristiwa pesetubuhanya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa keterangan anak saksi Korban tidak dapat dipercaya dan diyakini kebenarannya berkaitan dengan adanya perbuatan Terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak saksi Korban untuk bersetubuh denganya.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsure ini, sehingga unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain” ini tidak terpenuhi dari

perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum.

Karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

D. Amar Putusan

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka amar putusan Hakim Pengadilan Kotabumi Nomor register perkara 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, alternative kedua, dan alternative ketiga Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

- c. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
- Dikembalikan kepada anak saksi Korban
- d. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi/Colt L300/ 2,346 CC
Model Pickup Nopol. BE 9115 FD No.Sin 4D56C-62109
Rangka L300db-213587
- e. 1 (satu) unit mobil Toyota/Kijang Super KF Long Nop
2029 J Nomor Rangka KF50-037348 No. Sin 5K-032274
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
- f. 1 (satu) unit *Hanphone* Nokia tipe 5130 *XpressMusic*

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA
ISLAM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA
ENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NO. 51/PID.SUS/2016/PN KB

Terkait dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Kotabumi No.51/Pid.Sus/PN.Kbu tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, yang mana hakim menegaskan dalam amar putusan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

[illegible]

Bunyi pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:

Selanjutnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam unsur kedua. Bahwa dijelaskan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan pelaku mengetahui konsekuensi atas perbuatan tersebut. Maka dari itu kehendak yang disadari ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selain itu dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyatakan bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri lebih dari satu (1) kali sehingga terdakwa menyetubuhi anak saksi korban adalah benar adanya.

[illegible]

tersebut yang dimaksud dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk adalah perbuatan yang dilakukan dengan akal cerdas sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dengan memberikan perkataan bohong atau yang tidak sebenarnya dengan tersusun rapi sehingga kebohongan yang satu menutup kebohongan yang lainya untuk memengaruhi orang menurutnya sehingga berbuat sesuatu yang apabila mengetahui maksud dari pelakunya ia tidak akan berbuat demikian.

Perlu diketahui bahwasanya unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi.

Namun yang menjadikan keganjilan disini adalah terkait perbedaan keterangan anak saksi korban dengan terdakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam keteranganya anak saksi korban menyatakan bahwa hubungan yang dilakukan di rumah saudara Aan adalah hubungan yang pertama kali, namun hal ini ditolak dengan terdakwa yang menyatakan hubungan tersebut bukan hubungan yang pertama kali bagi anak saksi korban. Sehingga kemudian ini yang menjadikan hakim tidak lagi mempercayai keterangan yang diutarakan oleh anak saksi korban.

Terkait hal tersebut hakim menyatakan bahwa anak saksi korban tidak dapat dipercaya dan diyakini kebenarannya berkaitan dengan keteranganya

yang menyatakan bahwa “Terdakwa akan bertanggungjawab untuk menikahi anak saksi korban setelah melakukan perbuatanya”.

Namun disini penulis pun mengakui bahwa hakim dalam menyatakan pendapat hukumnya dilandasi keterangan saksi-saksi yang lain, meskipun saksi disini adalah saksi yang tidak melihat kejadian secara langsung melainkan hanya mendengar dari cerita orang lain atau *testimonium de auditu*. Saksi *testimonium de auditu* ini jikalau kita mengacu terhadap Pasal 184 KUHAP maka bukanlah termasuk alat bukti namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 818/K/Sip/183 saksi *testimonium de auditu* ini dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mendukung saksi biasa. Namun yang menjadi persoalan adalah tidak ada sama sekali saksi biasa kecuali anak saksi korban.

Selain itu majelis hakim dalam menggali petunjuk terhadap keterangan saksi-saksi yang dibawa dihadapan persidangan terlihat sangatlah timpang atau berat sebelah. Hal ini kemudian nampak jelas dalam pertimbangan hakim yang tidak sama sekali menyebutkan keterangan saksi dari korban. Dalam keseluruhanya majelis hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari pihak terdakwa sehingga kemudian tidak aneh ketika terlihat seolah-olah terdakwa berbohong.

Terkait dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa unsur tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain tampak hanya

Terlebih lagi dalam putusan tersebut tidak ditemukan pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim terkait hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terhadap terdakwa. Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan lebih dalam hasil dari *Visum at Rapertum* dari Rumah Sakit Hi. Muhammad Yusuf No.001/VER/RS-HMY/II/2016 tertanggal 9 Maret 2016. Meskipun telah jelas dalam hasil *Visum* tersebut dijumpai luka robek lama pada bibir vagina akibat benda tumpul. Maka dari itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara nyata merupakan bentuk pencabulan. Terlebih majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut harus dibuktikan bentuk dari perbuatannya dan tidak hanya peristiwa persetubuhannya.

[illegible]

secara jelas dalam dakwaan Penuntut Umum perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya dilakukan satu kali melainkan tiga kali.

Poin utama yang menjadi sebuah garis tebal adalah pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mengutamakan anak untuk dilindungi tetapi perlindungan tersebut tidaklah serta merta mengabaikan dan mengurangi hak-hak asasi warga negara yang lain. Namun dalam hal ini putusan majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan. Putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa dalam kasus ini bebas dari segala tuntutan hukum merupakan salah satu bentuk pengurangan hak asasi anak, karena anak korban dalam putusan ini secara jelas telah dilakukan pencabulan oleh terdakwa.

B. Analisis Hukum Acara Pidana Terhadap Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan No.51/Pid.Sus/PN.Kbu

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* atau *Civil Law Sistem* , konsekuensi logis dari sistem ini dalam ranah persidangan adalah segala bentuk pembuktian dalam persidangan harus berdasarkan hukum yang tertulis atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karakteristik dari sistem hukum ini adalah kepastian hukum. Maka dari itu hakim sebagai penegak keadilan berfungsi

untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam batas kewenangannya.

Terkait dengan analisis hukum acara pidana dalam putusan ini penulis akan mengkaji secara sistematis terkait mekanisme pembuktian dalam persidangan. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan terdiri dari saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Ketika Pemeriksaan keterangan saksi, majelis hakim telah memeriksa seluruh saksi dalam persidangan. Hanya terdapat satu orang saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai saksi yang dimaksud dalam hukum acara pidana, yakni saksi korban. Saksi yang lain merupakan saksi yang tidak melihat kejadian secara langsung dan hanya mendengar dari keterangan orang lain atau sering dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*.

Hal inilah kemudian yang menjadikan timpang dalam putusan ini. Telah jelas dalam pertimbangan hakim sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap keterangan saksi pihak korban, namun hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa. Seharusnya sudah sepatutnya dan merupakan kewajiban seorang hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan kesaksian dari kedua belah pihak karena pada dasarnya hakim harus adil dalam menjalankan kewajiban sebagai penegak hukum.

Memang dalam hal ini terdapat perbedaan keterangan saksi antara saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan saksi yang diajukan oleh

pihak terdakwa. Terkait dengan perbedaan tersebut sudah sepatutnya majelis hakim menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang negatif karena sistem peradilan yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut pembuktian secara negatif, selain itu majelis hakim dalam menentukan keyakinan harus berdasarkan Undang-Undang.

Selain terdapat perbedaan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan saksi yang diajukan oleh terdakwa, terdapat pula keterangan yang berbeda antara saksi korban dengan keterangan terdakwa. Hal ini telah diakui oleh majelis hakim yang mana tertuang dalam pertimbangan hukum. Meskipun telah disampaikan melalui pertimbangan hukumnya majelis lebih condong terhadap keterangan terdakwa dari pada keterangan saksi korban. Padahal berdasarkan pasal 189 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa pernyataan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini berarti setiap keterangan terdakwa dalam persidangan hanya diterima dan diakui oleh mejelis hakim sebagai alat bukti yang mengikat terhadap dirinya sendiri.

Terkait dengan keterangan saksi *testimonium de auditu* yang mana keteranganya didapat dari orang lain. Maka dari itu tidak memiliki kekuatan nilai sebagai saksi. Meskipun keterangan saksi *testimonium de auditu* ini juga tidak boleh diabaikan begitu saja, keterangan ini dapat dijadikan petunjuk bagi hakim dalam pembuktian yang lain di persidangan. Namun yang menjadi problematika adalah terkait dengan pertimbangan yang hanya menitik beratkan terhadap saksi yang meringankan terdakwa.

Terlebih lagi kita harus mampu memahami karakteristik sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 183 KUHAP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang benar-benar melakukannya”. Jikalau kita memahami dan menelaah makna dari yang terkandung dalam sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sebagaimana tertuang dalam pasal 183 maka kita dapatkan adalah sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif.

Namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang tertuang dalam putusan ini kenyataannya terdapat kurang sadaran oleh majelis hakim yang menitik beratkan salah atau tidaknya seseorang berdasarkan keyakinan. Nampak jelas dalam pertimbangan putusan ini penilaian yang dilakukan oleh majelis hakim lebih kepada keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat bukti yang sah. Misalnya dalam hal ini alat bukti berupa keterangan saksi korban dan alat bukti surat. Pertimbangan putusan ini hakim lebih condong dalam penilaian benar atau tidaknya keterangan korban sehingga dalam hal ini majelis hakim lebih kepada sistem pembuktian Undang-Undang positif.

Terlebih lagi dalam putusan ini sangat sedikit uraian majelis hakim yang tersusun secara sistematis dan argumentatif mengaitkan dan memadukan keterangan saksi korban dengan keyakinan hakim. Majelis

hakim tidak lebih condong mengaitkan keterangan terhadap saksi-saksi yang meringankan terdakwa dan kemudian menghubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tepatnya pada unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan membujuk. Secara tidak langsung seolah-olah keyakinan hakim atas keterangan bohong atau tidak benar yang disampaikan oleh saksi korban hanya ditarik kesimpulan tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan terdakwa yang dibuktikan. Akibatnya pertimbangan majelis Hakim hanya bersifat deskriptif dan terkesan mengulang-ulang keterangan dari saksi korban, terdakwa, dan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa.

Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 51/Pid.Sus./PN.Kbu dengan Terdakwa Febri Anggara Alias Angga bin Heri Nugroho belum dapat dikatakan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim lebih condong terhadap keterangan-keterangan yang meringankan terdakwa dan cenderung mengutamakan keyakinan hakim dari pada ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya fakta-fakta yang terungkap pada tingkat per
maupun tingkat penyidikan hanya berlaku sebagai hasil per

Maka dari itu hukum pidana Islam yang merupakan cermin nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam secara umum

Dalam kasus putusan Pengandilan Negeri Kotabumi No. 51/Pid.Sus/PN.Kbu tentang pencabulan anak dibawah umur, ya

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya yang pembuktian dalam hukum Islam adalah upaya untuk memberikan k

Pertama, yakni adalah pengakuan atau *ikrar*. Pengakuan dalam hukum Islam menempati posisi pertama dalam kekuatan alat bukti. Pengakuan merupakan bentuk keterangan terdakwa di dalam persidangan dalam upaya memberikan keterangan terhadap perbuatan yang telah diperbuat. Sedangkan dalam hukum positif pengakuan merupakan persamaan dari keterangan terdakwa. Dalam putusan ini majelis hakim pun telah memeriksa keterangan terdakwa.

[illegible]

Disisi lain keterangan dari salah satu saksi yang meringankan terdakwa tidak berdasarkan atas sumpah. Padahal sumpah merupakan salah satu dari alat bukti dalam hukum Islam. Kekuatan sumpah juga dipertimbangkan dalam hukum islam. Rasulullah SAW telah mengingatkan terkait dengan redaksi sumpah itu sendiri, yakni:

Artinya: Barangsiapa bersumpah maka bersumpahlah dengan “*billahi*” atau jangan bersumpah”.

Maka dari itu kekuatan kesaksian dari orang yang tidak disumpah dalam memberikan keterangan jelas berbeda dengan mereka yang

memberikan kesaksian di atas sumpah. Terlebih lagi saksi yang dimaksud adalah pengetahuan dari orang lain.

Disisi lain saksi yang memberatkan terdakwa berjumlah tiga (orang) yangmana ketiga dari saksi tersebut menerangkan pengetahuanya di atas sumpah. Namun dalam pertimbangan majelis hakim tidak ada sama sekali menyebut terkait keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini hakim telah memutus perkara berdasarkan pengetahuan hakim itu sendiri. Memang masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan memutus perkara berdasarkan pengetahuan hakim.

Pertama, ada yang mengatakan dalam perkara pidana tidak boleh memutus berdasarkan pengetahuanya. Kedua, boleh menjatuhkan pidana berdasarkan pengetahuan kecuali pidana *had*. ketiga, boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuanya dalam perkara *had* atau yang lain secara mutlak.

Terdapat riwayat dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa keterangan dua saksi laki-laki hanya memberi persangkaan, dan kalau saja hal tersebut sudah dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman, maka terlebih lagi dengan pengetahuan hakim.

Dari pernyataan tersebut penulis dapat mengambil intisari makna yakni, bahwa dengan dua (2) orang saksi laki-laki ditambah dengan pengetahun hakim, maka majelis hakim dapat memberikan putusan menyatakan bahwa terdakwa adalah bersalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ...

Berdasarkan surat tersebut maka sangat diperlukan bagi seluruh elemen penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum, yangmana dalam setiap putusnya mengucapkan kalimat “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” menjadi sebuah tanggung jawab di dunia dan akhirat. Sehingga pemaknaan tujuan hukum islam sudah sepatutnya mampu terimplementasikan dalam setiap putusan-putusan pengadilan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas terkait dengan pertimbangan hakim, analisis perspektif hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara peradilan islam. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 82

Dalam hukum acara pidana Islam pada dasarnya alat bukti terdiri dari: pengakuan (*ikrar*), kesaksian (*syahadah*), petunjuk (*qorinah*), sumpah (*yamin*), dan penolakan sumpah (*nukul*). Putusan pengadilan Negeri Kotabumi No. 51/Pid.Sus/PN.Kbu ini dalam pembuktian telah mengajukan alat bukti pengakuan, kesaksian, petunjuk, dan sumpah. Dalam putusan ini saksi yang memenuhi kriteria saksi sebagaimana dijelaskan dalam hukum islam hanya satu saksi, saksi yang lain merupakan saksi *syahadah al iftifadlah* atau saksi yang pengetahuannya dari orang lain.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Demi menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum (hakim) harus senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Terlebih lagi mampu mengejawantahkan hakikat penegakan hukum sebagaimana mestinya.
2. Sudah sepatutnya seluruh komponen masyarakat Indonesia lebih memahami esensi dari prikemanusiaan yang termaktub dalam pancasila, yakni mampu menghargai hak-hak orang lain yang telah dilindungi oleh Undang-Undang.

1. Demi menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum (hakim) harus senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Terlebih lagi mampu mengejewantahkan hakikat penegakan hukum sebagaimana mestinya.
2. Sudah sepatutnya seluruh komponen masyarakat Indonesia lebih memahami esensi dari prikemanusiaan yang termaktub dalam pancasila, yakni mampu menghargai hak-hak orang lain yang telah dilindungi oleh Undang-Undang.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss.
- Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1991.
- Sughandi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1981.
- Sunarso Siswanto. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Yudowidakdo, Hendrastanto, dkk. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.

SKRIPSI, ARTIKEL, DAN JURNAL ILMIAH

- Ariani, Sofi. *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw)”*. Skripsi--IAIN Sunan Ampel. 2016.
- Musahab. *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU. No 23 Tahun 2002”*. Skripsi--IAIN Sunan Ampel. 2009.
- Rahmawati, Vani. *“Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)”*. Skripsi-Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.
- Sholihudin. *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua Kepada Anaknya (Telaah Atas Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul/ Asusila Orang Tua Kepada Anaknya)”*. Skripsi—IAIN Sunan Ampel. 2004.
- Tawakal, Iqbal. *“Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/Pid.B/2008/PNSby Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”*. Skripsi—IAIN Sunan Ampel. 2009.

